BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Geografi

1. Pengertian Geografi Perdesaan

Pada awalnya konsep geografi dikemukakan oleh Eratosthenes yang menggunakan kata “geographyka” yang berasal dari dua kata yaitu “geo” berarti “bumi” dan “graphika” berarti lukisan atau tulisan. Jadi dalam bahasa Yunani, geographika mempunyai arti lukisan tentang bumi *(description of the earth)* atau tulisan tentang bumi *(writing about the earth*) (Nursid Sumaatmaja, 1981: 30).

Kemudian sejalan dengan pengenalan manusia tentang lingkungan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengertian geografi tidak terbatas pada tulisan tentang bumi, namun berkembang menjadi pengertian sebagai bidang ilmu pengetahuan.

Menurut Seminar Lokakarya tahun 1988 di Semarang, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungaan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 15).

Geografi Perdesaan itu sendiri merupakan salah satu studi ilmu geografi yang termasuk dalam kelompok studi Geografi Manusia (*Human Geography)*. Geografi perdesaan muncul pada akhir tahun 1960an yang dianggap lamban karena kurangnya perhatian ilmuwan

Geografi akan masalah-masalah sosial ekonomi di perdesaan (Suparmini, 2004: 1).

Pengertian desa itu sendiri jika ditinjau dari segi geografi menurut Bintarto (1983: 11-12) :

> Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Sedangkan dalam bukunya N. Daldjoeni (1987: 45) menyebutkan bahwa desa yang dilihat sebagai permukiman merupakan suatu tempat atau daerah di mana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoonesia.

Pada intinya menurut Bintarto (1983: 14), desa mempunyai tiga unsur, yaitu :

a. Daerah, meliputi tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.

b. Penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
c. Tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

Menurut penjelasan di atas, geografi perdesaan merupakan salah satu studi ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial ekonomi di perdesaan. Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan-permasalahan ekonomi khususnya tentang kemiskinan di perdesaan. salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut dilaksanaan suatu program yaitu PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Desa Situwanngi, mereka bersama-sama melaksanakan program tersebut dengan tujuan memberantas kemiskinan. Jadi, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu kajian dalam geografi perdesaan yang mengkaji tentang permasalahan sosial ekonomi di perdesaan.

2. Konsep Esensial Geografi

Konsep esensial geografi merupakan konsep utama dalam pelajaran geografi yang perlu dikuasai atau dipehatikan guru dan siswa di sekolah. Dalam Seminar dan Lokakarya di Semarang menetapkan ada 10 konsep esensial geografi (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 26). Sepuluh konsep tersebut, yaitu konsep lokasi, jarak, pola, morfologi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, diferensiasi area, interaksi, dan nilai kegunaan. Dalam penelitian ini konsep yang dgunakan adalah konsep lokasi, keterjangkauan, interaksi, dan nilai kegunaan.

a. Konsep Lokasi

Konsep lokasi merupakan konsep utama yang menjadi ciri khas dari ilmu geografi, pengertian lokasi dibedakan menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem *grid* atau kisi-kisi atau koordinat, sedangkan lokasi relatif disebut juga dengan letak geografis (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 27). Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lokasi atau letak pelaksanaan penelitian yaitu di Desa Situwangi baik letak absolut maupun letak geografisnya.

b. Konsep Keterjangkauan

Keterjangkauan dalam bahasa Inggrisnya disebut *accessability*, yaitu berkaitan dengan kondisi medan atau tidak adanya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan juga berlaku bagi individu. Bagi yang mudah kontak atau berkomunikasi (bergaul) dengan orang lain lazimnya akan lebih mudah maju dan menyesuaikan diri, sebaliknya bagi yang tertutup cenderung mengalami ketertinggalan (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 30).

c. Konsep Interaksi/Interdependensi

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya, objek atau tempat satu dengan tempat lain. Hal ini terjadi karena setiap tempat mengembangkan potensi alamnya dan kebutuhan

masyarakat yang berbeda-beda. Sedangkan, interaksi keruangan sendiri terjadi antara unsur atau fenomena setempat, baik antara fenomena alam ataupun kehidupan (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 33).

d. Konsep Nilai Kegunaan

Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 30). Nilai kegunaan di sini dititikberatkan kepada peran dan manfaat dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Situwangi.

3. Pendekatan Geografi

Menurut Bintarto dan Surastopo (1987: 12), dalam geografi terpadu untuk mendekati atau menghampiri masalah dalam geografi digunakan bermacam-macam pendekatan atau hampiran *(approach)* yaitu pendekatan analisa keruangan *(spatial analysis)*, analisa ekologi *(ecological analysis)*, dan analisa kompleks wilayah *(regional complex analysis)*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dengan melihat aktivitas manusia dalam suatu ruang yaitu pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang melibatkan masyarakat desa dengan interaksinya baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan alam sekitar yang terjadi pada satu ruang yaitu di Desa Situwangi. Dalam Nursid Sumaatmadja

(1981: 78) menyebutkan pendekatan keruangan terdiri dari pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional.

Pendekatan topik mengkaji tentang topik yang sedang menjadi perhatian (Nursid Sumaatmadja, 1981: 78). Penelitian ini mengkaji tentang implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa Situwangi. Peneliti mengambil topik tersebut karena topik tersebut sedang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat desa khususnya di bidang pembangunan desa.

Pendekatan aktivitas manusia ditinjau dari penyebarannya, interelasinya, dan deskripsinya dengan gejala-gejala lain yang berkaitan (Nursid Sumaatmadja, 1981: 79). Persebaran rumah tangga miskin di desa Situwangi menjadi masalah utama, kemudian pemerintah dan masyarakat setempat melaksanakan PNPM-MP yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri dengan sasaran pemberantasan kemiskinan pada rumah tangga miskin.

Region dapat dikonsepkan sebagai suatu wilayah dipermukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang membedakan diri dari region-region lainnya. Tekanan utama dalam pendekatan ini adalah ruang atau wadahnya (Nursid Sumaatmadja, 1981: 80). Segala aktivitas manusia dan interelasi yang ada di dalamnya terjadi di satu ruang atau wadah yaitu di Desa Situwangi. Masyarakat desa dengan potensi desa yang dimiliki secara bersama-sama melaksanakan kegiatan PNPM-MP untuk pemberantasan kemiskinan di desa tersebut.

B. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “implementasi” diartikan “pelaksanaan atau penerapan”. Sedangkan menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabarien dalam Azam Awang (2010: 28), menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris *empowerment* yang artinya secara harfiah, yaitu “pemberkuasaan” atau “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah (Azam Awang, 2010: 45).

Menurut Stewart (1998) dalam Azam Awang (2010: 46), pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan. Lebih lanjut Stewart menyatakan bahwa:

a. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Pemberdayaan memberi kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.
c. Pemberdayaan memberi manfaat besar bagi organisasi di mana salah satunya adalah bertambahnyaa efektivitas organisasi.

Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses menuju perbaikan dan peningkatan, serta memberi manfaat kepada masyarakat.

Sedangkan “proses” itu sendiri menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Ambar Teguh, 2004: 77).

Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 72) mengartikan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Jadi pemberdayaan dilakukan secara berkesinambungan atau saling terkait terus menerus baik secara individu maupun kolektif untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terjadi traansformasi dari tidak atau kurang mempunyai daya menjadi berdaya kuat.

Usaha untuk menjadikan manusia berkemampuan, berdaya, dapat disebut pemberdayaan atau pemberdayaan adalah segenap proses untuk memanusiawikan manusia dengan segenap harkat dan martabat yang melekat (Azam Awang, 2010: 48). Pemberdayaan ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri. Mandiri pada kemampuan dan kekuatan mereka sendiri dan tidak mudah untuk menyerah.

Kemudian Taliziduhu Ndraha (1987: 67) menegaskan konsep masyarakat mandiri dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator, yaitu :

a. Kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara atau merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik yang berbentuk fisik maupun nonfiisik.
b. Kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari keadaan jatuh atau mundur sebagai akibat kekeliruan yang pernah ditempuhnya.
c. Kemampuan masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber, asset, atau peralatan yang ada.
d. Kemampuan masyarakat untuk memberi respons positif terhadap setiap perubahan sosial yang berlangsung.

Setelah masyarakat menjadi mandiri, mampu mengatur dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Bintarto (1983: 18-19), salah satu untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan modernisasi, yaitu:

a. Menempatkan warga masyarakat desa pada kedudukan yang sebenarnya sebagai warga desa.
b. Mengusahakan agar corak kehidupan dan penghidupan warga desa dapat ditingkatkan atas dasar alam pikiran yang logis, fragmatis, dan rasional.
c. Mengusahakan agar warga desa lebih bersifat kreatif, dinamis, dan fleksibel dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dijumpai, sehingga dapat lebih meningkatkan semangat pembangunannya.

Selanjutnya Bintarto (1983: 20) mengemukakan beberapa tujuan dari modernisasi desa, yaitu :

a. Modernisasi dapat memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monotomi dari kehidupan desa.
b. Modernisasi desa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa.
c. Modernisasi yang berarti suatu usaha usaha meningkatkan bidang pendidikan secara merata.
d. Modernisasi dibidang pengangkutan akan secara berangsur menghilangkan sifat isolasi desa.
e. Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi pedesaan dan dalam proses pengembangannya warga desa dapat diikutsertakan.

Pemberdayaan merupakan proses belajar hingga mencapai kemandirian, meskipun demikian kemandirian itu harus tetap dijaga, sehingga perlu ada pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus agar tidak mengalami kemunduran. Dalam hal ini, pemberdayaan sifatnya bertahap. Menurut Ambar Teguh (2004: 83) dalam bukunya *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* dijelaskan ada tiga tahap dalam pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Tahap pertama, penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan potensi diri.
b. Tahap kedua, tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan

memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.

c. Tahap ketiga, peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin perlu adanya peran dari tiga aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	**Peran dalam Pemberdayaan**	**Bentuk Output Peran**	**Fasilitasi**
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan *Policy*, Implementasi Monitoring dan Evaluasi Mediasi	Kebijakan: Politik, Umum, Khusus/Departemental/Sektoral Penganggaran, Juknis dan Juklak, Penetapan indikator keberhasilan Peraturan Hukum, Penyelesaian sengketa	Dana, jaminan, alat, teknologi, *network*, sistem manajemen informasi, edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan Rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/*policy action* implementasi, donator, *private investment* pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. *Policy action*, dana swadaya Menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek Menghidupkan fungsi *social control*	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih

Sumber: Ambar Teguh (2004: 97)

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pembangunan desa, karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah untuk membangun perdesaan. Adapun pengertian pembangunan perdesaan menurut Departemen Dalam Negeri (1977) dalam Khairuddin (1992: 67), pembanguanan pedesaan adalah suatu usaha pembangunan dari

masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara dan sebagai usaha yang menyeluruh.

Tujuan dari pembangunan perdesaan ini menurut Khairuddin (1992: 68) mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang hendak dicapai adalah untuk menaikkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat, khususnya di desa-desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan desa dan masyarakat desa dalam suatu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Khairuddin (1992: 69-75) mengemukakan beberapa pendekatan dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu:

a. Pendekatan Komprehensif

   Pendekatan ini menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan sebagai unsur partisipan dalam pembangunan karena beranggapan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah kepentingan seluruh anggota masyarakat.

b. Pendekatan Integral

   Pendekatan ini memandang satu aspek kehidupan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dari aspek kehidupan lain.

Sehingga pembangunan yang dilakukan berusaha memajukan dan mengembangkan seluruh lapangan kehidupan masyarakat yang ada.

c. Pendekatan Organis

Pendekatan ini menekankan pada pengembangan sumber-sumber yang potensial yang ada di desa bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pokok masyarakatnya.

d. Pendekatan Selektif

Pendekatan ini hanya mengutamakan salah satu atau beberapa bidang yang dianggap dapat menunjang program pokok pembangunan.

e. Pendekatan Pertumbuhan

Pendekatan ini didasarkan pada pola kemungkinan pertumbuhan atau perkembangan daerah dan pola pertumbuhan tiap tahap yang telat ditentukan. Misalnya kategori desa, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada yang masing-masing sudah ditentukan menurut perkembangan dan tingkat prasarananya.

f. Pendekatan Ekologi

Pendekatan ini mengacu pada hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia. Manusia menyadari bahwa lingkungan yang dipengaruhi oleh perbuatan manusia kembali memberikan akibat yang mempengaruhi manusia itu sendiri.

g. Pendekatan Regional

Pendekatan regional di sini adalah pendekatan pembangunan atas satu wilayah tertentu lepas dari batas-batas administratifnya. Oleh karena itu, untuk daerah perdesaan disebut pembangunan perdesaan, bukan pembangunan desa, karena bila disebut pembangunan desa akan terikat oleh batas-batas administratif suatu desa tertentu.

h. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa penduduk perdesaan adalah subyek pembangunan, sumber daya manusia yang potensial. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembentukan motivasi dalam diri masyarakat setempat, serta perubahan sikap mental masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif.

3. Konsep Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan, mulai dari ratusan tahun yang lalu masalah kemiskinan sudah muncul di dunia ini. Banyak definisi kemiskinan yang di paparkan oleh para ilmuwan yang membidanginya.

Parsudi Suparlan (1993: xi) dalam bukunya menjelaskan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Daman Huri, dkk (2008: 29) dalam bukunya *Demokrasi dan Kemiskinan* menuturkan bahwa untuk melihat kemiskinan setidaknya dengan tiga perspektif, yaitu :

1) Kemiskinan sebagai fenomena *transcendental*

   Seseorang miskin adalah karena takdir Tuhan menghendaki demikian, orang itu ditakdirkan lahir dari keluarga miskin. Sedangkan untuk mengubahnya manusia hanya diberi satu pilihan, yaitu berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengubah nasibnya.

2) Kemiskinan sebagai fenomena sosial

   Dalam perspektif ini orang miskin akibat dari mentalitas orang yang bersangkutan. Orang menjadi miskin karena malas, bodoh dan tidak mau bekerja keras, serta tidak mempunyai etos kerja yang tinggi.

3) Kemiskinan struktural

   Dalam perspektif ini kemiskinan lebih diakibatkan karena struktur tidak memberi peluang kepada orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Berbeda dengan kedua perspektif sebelumnya yang melihat kemiskinan diakibatkan karena takdir atau malas bekerja, namun karena penciptaan struktur.

b. Sebab-sebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kependudukan yang berkenaan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan termasuk dalam lima masalah besar kependudukan. Sebagaimana David L. Sill dalam Nursid Sumaatmadja (1981: 226) mengemukakan lima masalah besar kependudukan diungkapkan sebagai 5P, yaitu *peace* (perdamaian), *prejudice* (prasangka), *population* (penduduk), *poverty* (kemiskinan), dan *pollution* (pencemaran).

Kemiskinan tidak hanya ada di negara-negara yang sedang berkembang atau negara terbelakang, tetapi juga terdapat di negara maju. Di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya, akibat sistem tidak adil, merajalelanya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), adanya diskriminasi sosial, atau tidak adanya jaminan sosial. Sedangkan di negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual. Misalnya, akibat mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah dan berkepanjangan, atau kecanduan alkohol. Kondisi ini biasanya melahirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari atau keluarga-keluarga tunggal (Edi Suharto, 2009: 17).

Selanjutnya, Edi Suharto (2009: 18) mengemukakan lebih terperinci tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu:

1) Faktor individual

Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2) Faktor sosial

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menjadikan orang itu miskin. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

3) Faktor kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha sering ditemukan pada orang-orang miskin.

4) Faktor struktural

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

c. Penanggulangan Kemiskinan

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan-pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan. Sesuai yang tercantum dalam UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Peninjauan kemiskinan secara nyata tidak terlepas dari pendapatan masyarakat yang kecil dengan daya beli masyarakat yang rendah. Ninik Sudarwati (2009: 39) mengemukakan bahwa pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui dua pendekatan atau strategi utama, yaitu:

1) Meningkatkan pendapatan
   Melalui peningkatan produktivitas, di mana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun politik
2) Mengurangi pengeluaran
   Melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Kemudian menurut Ninik Sudarwati (2009: 40) strategi tersebut dapat ditempuh melalui empat langkah kebijakan sebagai berikut:

1) Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

2) Pemberdayaan masyarakat.

3) Peningkatan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia.

4) Perlindungan sosial.

Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, namun harus memberdayakan masyarakat karena kemiskinan tidak hanya bersifat materialistik saja, akan tetapi karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena hal tersebut, maka langkah dan kebijakan (Ninik Sudarwati, 2009: 45) diarahkan pada:

1) Pertumbahan kesadaran kritis masyarakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.
2) Peningkatan kapasitas dan pembangunan kelembagaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengembangkan demokrasi, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan.
3) Memperkuat akses masyarakat miskin kepada berbagai sumber daya kunci, keterampilan berorganisasi secara modern, dan pelembagaan budaya industri.
4) Penguatan manajemen dan informasi bagi lembaga/organisasi komunitas masyarakat miskin.
5) Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas program/kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan.
6) Peningkatan dan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin.

7) Pelembagaan komunikasi dan koordinasi antar masyarakat, pemerintah dan pelaku lainnya melalui forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

Sedangkan, menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) karakteristik program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Menggunakan pendekatan partisipatif
2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
3) Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
4) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

(http://tnp2k.wapresri.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2011)

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

a. Deskripsi PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. (Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, 2007: 14).

Pelaksanaan PNPM Mandiri dilaksanakan mulai tahun 2007 yang dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar

pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Program selanjutnya adalah Program Pengembangan dan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah-daerah sekitarnya.

PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri adalah pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dianggap berhasil. Beberapa keberhasilan dari PPK, yaitu penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisien dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2007: 5).

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan kusus. Tujuan umum dari PNPM-Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan tujuan secara khusus menurut PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2007: 6) adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Keluaran Program (PTO PNPM-MP, 2007: 6) meliputi:

1) Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.
2) Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.
3) Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif.
4) Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi Masyarakat.
5) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM.
6) Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan.
7) Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinana perdesaan.

Selanjutnya, sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan meliputi lokasi sasaran dan kelompok sasaran.

1) Lokasi Sasaran:

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Kelompok Sasaran:

a) Masyarakat miskin di perdesaan

b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan

c) Kelembagaan pemerintahan lokal

b. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.

1) Perencanaan

Pada tahap perencanaan di sini yang akan dikaji adalah sosialisasi di desa dan penggalian gagasan. Sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang ssosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Adapun hasil yang diharapkan dalam sosialisi ini dalam PTO PNPM-MP (2007: 23) adalah:

a) Dipahaminya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur.

b) Dipahaminya cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya.
c) Dipahaminya cara pemetaan RTM dan kegunaannya.
d) Dipahaminya konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi
e) Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola MMDD sebagai panduan penyusunan RPJMDes, serta rencana program/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa
f) Disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus
g) Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan
h) Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan
i) Tersosialisasikannya rencana pembentukan UPK dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan kewenangannya. Untuk kecamatan yang sudah terbentuk UPK dan BP-UPK perlu disosialisasikan tugas, kewenangan, dan kategori kinerja lembaga ini kepada peserta yang hadir
j) Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan PNPM PPK atau Mandiri Perdesaan yang telah berjalan sebelumnya terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana prasarana yang telah dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran
k) Tersusunnya rencana penggunaan DOK Perencanaan

Sedangkan, penggalian gagasan adalah proses untuk menemukenali gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di

masyarakat (PTO PNPM-MP, 2007: 23). Dalam musyawarah penggalian gagasan dibutuhkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan kebutuhan RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana bantuan langsung masyarakat (BLM) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria dalam Materi Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan (2010: 3), meliputi:

a) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
b) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
c) Dapat dikerjakan oleh masyarakat
d) Didukung oleh sumber daya yang ada
e) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

2) Pelaksanaan Program Kegiatan

Pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Pelaksanaan tersebut berupa pelaksanaan program kegiatan yang sudah disepakati dan disetujui yaitu berupa pembangunan sarana prasarana, pelayanan di bidang pendidikan dan

kesehatan, peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi, dan penambahan modal untuk SPP.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan harus didasarkan pada prinsip dasar. Ada 10 prinsip dasar dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang tercantum dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2007: 6-7), yaitu:

a) Bertumpu pada pembangunan manusia
   Maksud dari prinsip tersebut adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
b) Otonomi
   Otonomi di sini adalah masyarakat mempunyai hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.
c) Desentralisasi
   Maksudnya adalah memberi ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
d) Berorientasi pada masyarakat miskin
   Maksud dari prinsip tersebut adalah segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin.
e) Partisipasi
   Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam proses atau alur tahapaan program dan pengawasannya dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
f) Kesetaraan dan keadilan gender
   Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
g) Demokratis

Pada prinsip ini, masyarakat dalam mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

h) Transparansi dan Akuntabel
Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

i) Prioritas
Dalam pemilihan program kegiatan diutamakan untuk pengentasan kemiskinan.

j) Keberlanjutan
Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

3) Pelestarian Kegiatan

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2007: 42), adalah:

a) Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat.
b) Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan–kesehatan, serta pengembangan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri.
c) Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat.

d) Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program.
e) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

c. Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menaggulangi masalah kemiskinan di perdesaan. setiap program pasti ada target atau tujuan yang dicapai. Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) target pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan target pencapaian program penanggulangan kemiskinan, pemerintah merumuskan target pencapaian berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan yang ada (http://tnp2k.wapresri.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2011).

Target tersebut dapat diukur berdasarkan skala waktu yaitu target jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang baik di tingkat nasional maupun daerah.

> Target jangka pendek mengacu pada RKP yang ditetapkan setiap tahun. Sedangkan target jangka menengah mengacu pada perencanaan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Nasional, serta RPJM Daerah untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Target jangka panjang mengacu pada perencanaan pembangunan 25 tahunan yang ditetapkan dalam RPJP Nasional pada lingkup nasional dan RPJP Daerah untuk lingkup provinsi dan

kabupaten/kota (http://tnp2k.wapresri.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2011).

Adapun target-target tersebut dalam bentuk angka yaitu:

1) Target RPJP (2004-2025) pada Tahun 2025 : Tingkat Kemiskinan: < 5 %
2) Target RPJMN (2004-2009) pada Tahun 2009:
   a) Penanggulangan Kemiskinan: 8,2 %
   b) Pengurangan Pengangguran: 5,1 %
3) Target dalam RKP 2009:
   a) Penanggulangan Kemiskinan: 12 – 14 %
   b) Pengurangan Pengangguran: 7 %

Namun, karena adanya krisis global yang mempengaruhi perekonomian nasional pemerintah bersama-sama dengan DPR, melakukan revisi target capaian, sehingga dalam target capaian RKP tahun 2009 menjadi:

1) Penanggulangan Kemiskinan : 13-14 %
2) Pengurangan Pengangguran : 7 %

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (PTO PNPM-MP, 2007: 5). Sedangkan kebutuhan dasar menurut Sudarman Danim (1995: 36), terdiri dari:

Tabel 4. Jenis-Jenis Kebutuhan Dasar

Jenis-jenis Kebutuhan Dasar	Indikator Masih di Bawah Standar Minimal	Keterangan
Sandang	Tidak tersedia lagi kebutuhan berkunjung ke pesta, bertamu atau ke tempat keramaian, melindungi diri dari cuaca dingin atau panas	Semua strata usia namun beda prioritas
Pangan	Tidak tersedia bahan makanan dan minuman yang memenuhi criteria sehat dan bersih secara minimal.	Semua strata usia namun beda prioritas dan sifat.
Perumahan	Tidak ada tempat tinggal yang layak dilihat dari pembagian ruang, pengaruh cuaca dan keamanan lainnya.	Semua strata usia
Pendidikan	Masih buta tulis, baca, dan berhitung sederhana.	Usia sekitar 6 tahun ke atas namun beda sifat dan prioritas
Kesehatan	Rentan terhadap penyakit, terserang penyakit menular atau penyakit kronis	Semua strata usia
Psikologik	Merasa terancam atau gangguan jiwa lainnya.	Usia sekitar 3 tahun ke atas
Raga	Disfungsi raga menurut perkembangan atau kebutuhan kerja	Semua strata usia namun beda sifat dan prioritas

Sumber: Sudarman Danim (1995: 36)

d. Peran PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga Miskin

Menurut Komaruddin (1994), peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen (http://dspace.widyatama.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juli 2011). Sedangkan peran PNPM Mandiri Perdesaan dalam Materi Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan (2010: 3), meliputi:

1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal).

3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

e. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala yaitu faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan; mengendalakan menghalangi; merintangi; menggendalakan. Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Faktor-faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan perdesaan dapat dapat dilihat dari segi kehidupan, seperti bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan geografis (Khairuddin, 1992: 79).

1) Hambatan sosial budaya

Hambatan sosial budaya yang timbul karena kebiasaan-kebiasaan dan tata hubungan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan pembangunan. Seperti sistem kepercayaan terhadap hal-hal yang irrasional, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

2) Hambatan politis

Hambatan politis di sini disebabkan oleh stabilitas politik yang belum mantap. Ketidakstabilan politik dapat memperlonggar aturan-aturan yang ada di desa.

3) Hambatan ekonomi

Hambatan di bidang ekonomi dilihat dari dua sisi, yaitu kurangnya modal yang dimiliki oleh masyarakat dan keterbatasan dana Negara untuk menyediakan biaya bagi pembangunan masyarakat desa (Khairuddin, 1992: 85).

4) Hambatan Geografis

Kondisi fisik ini berupa letak geografis, klimatologis, dan sumber-sumber alam yang terkandung di desa tersebut. Letak geografis desa menentukan percepatan pembangunan desa. Desa yang tidak strategis, sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya sulit untuk dibangun prasarana komunikasi desa bersangkutan.

Selain itu kondisi klimatologis juga berpengaruh pada pembangunan desa karena desa masih didominasi dengan usaha pertanian. Unsur dari cuaca dan iklim sendiri meliputi temperatur udara, kelembaban udara, curah hujan, tekanan udara, angin, durasi sinar matahari, dan beberapa unsur iklim lain yang kurang penting (Bayong Tjasyono, 1987: 11). Unsur-

unsur tersebut mempengaruhi aktivitas pertanian untuk memilih tanaman yang cocok dengan desa setempat.

Sumber-sumber alam yang dimiliki oleh desa juga berpengaruh pada pembangunan desa. Menurut Bintarto (1983: 17-18) potensi fisik yang dimiliki oleh desa, meliputi:

a) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
b) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluansehari-hari.
c) Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
d) Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
e) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen

C. Keterkaitan Antara PNPM Mandiri Perdesaan Dengan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Nomor 20 tahun 2003).

Adapun unsur-unsur yang secara essensial yang tercakup dalam pengertian pendidikan menurut Dwi Siswoyo, dkk (2007: 20-21), yaitu:

1. Dalam pendidikan terkandung pembinaan (pembinaan kepribadian), pengembangan (pengembangan kemampuan-kemampuan atau potensi-

potensi yang perlu dikembangkan), peningkatan (misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak tahu tentang dirinya menjadi tahu tentang dirinya) serta tujuan (ke arah mana peserta didik akan diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin).

2. Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua fihak, yaitu fihak pendidik dan fihak peserta didik yang di dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peranan setiap fihak, akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu saling mempengaruhi, guna terlaksananya proses pendidikan (transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan) yang tertuju kepada tujuan-tujuan yang diinginkan.
3. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan.
4. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah dan dalam masyarakat.

Pendidikan berintikan pada interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan ini dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, terjadi interaksi pendidikan terjadi antara orang tua dan anak. Interaksi yang berjalan tidak mempunyai rencana yang tertulis atau tidak mempunyai rancangan yang konkret dan kadangkala juga tidak disadari. Maka pendidikan dalam keluarga disebut

pendidikan informal karena tidak memiliki kurikulum formal dan tertulis (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005: 1).

Pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, karena guru sebagai pendidik telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan guru. Di sekolah guru melakukan interaksi pendidikan secara berencana dan sadar. Dalam lingkungan sekolah telah ada kurikulum formal, yang bersifat tertulis. Guru-guru melaksanakan tugas mendidik secara formal, sehingga pendidikan yang berlangsung di sekolah disebut pendidikan formal (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005: 2). Sedangkan pendidikan di lingkungan masyarakat sering disebut dengan pendidikan di luar sekolah karena sifatnya ada yang formal dan ada yang kurang formal. Pendidikan formal di masyarakat seperti halnya kursus-kursus, dan pendidikan kurang formal seperti ceramah, sarasehan, dan pergaulan kerja.

Dari uraian di atas bahwa adanya rancangan atau kurikulum formal dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan sekolah, kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah dan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran.

Selanjutnya ada tiga konsep kurikulum menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 27), meliputi:

1. Kurikulum sebagai suatu substansi, suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai.

2. Kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kuriikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.
3. Kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pangajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum.

Mulai tahun pelajaran 2006/2007, Depdiknas meluncurkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau dikenal dengan Kurikulum 2006. Kurikulum ini diolah berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan produk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam kurikulum ini guru diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum, dan murid sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah dipacu untuk dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia. Dalam kurikulum 2006 hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang harus menentukan indikator dan materi pokok pelajaran, disesuaikan dengan situasi daerah dan minat anak didik (Muhammad Joko Susilo, 2007: 94-97).

Dalam pembahasan ini akan dikaji tentang keterkaitan antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan bidang Pendidikan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program dari pemerintah dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dengan cara memberdayakan seluruh masyarakat desa dengan melihat potensi desa yang dimiliki desa tersebut. Adapun materi yang membahas tentang perkembangan desa dan potensi desa dapat dipelajari di lingkup sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) khususnya di kelas XII semester 2 dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut:

Standar Kompetensi : 3. Menganalisis wilayah dan pewilayahan.

Kompetensi Dasar : 3.1. Menganalisis pola persebaran, spasial, hubungan, serta interaksi spasial antara desa dan kota.

Melihat keterkaitan tersebut, sebenarnya dasar-dasar untuk mengetahui atau mempelajari potensi desa dan perkembangannya sudah dipelajari oleh siswa dibangku sekolah, sehingga siswa lebih mengenal tempat tinggalnya.

Pada materi potensi desa dibahas tentang potensi fisik dan potensi nonfisik yang dimiliki oleh desa tersebut. Sedangkan perkembangan desa lebih dibahas tentang perkembangan masyarakat desa menuju modernisasi. Seperti halnya dengan PNPM Mandiri Perdesaan, hasil yang diharapkan dari program ini masyarakat desa juga berkembang menuju modernisasi.

Selain dibangku sekolah, geografi perdesaan juga dipelajari di bangku perkuliahan. Perkembangan Geografi Perdesaan menurut pandangan

tradisional, ruang lingkup geografi perdesaan meliputi persoalan yang berhubungan dengan pertanian, permukiman, dan tata guna lahan (A.J. Suhardjo, 2008: 3). Namun dalam perkembangannya kajian geografi perdesaan meliputi pula pada persoalan-persoalan perdesaan yang lain, seperti transportasi perdesaan, kesempatan kerja, perumahan, strategi pengembangan perdesaan, dan lain-lainnya (A.J. Suhardjo, 2008: 4). Kajian-kajian tersebut tertuju pada pembangunan perdesaan karena melihat pada persoalan-persoalan yang ada di desa.

Kajian-kajian yang ada pada geografi perdesaan diimplementasikan dalam salah satu program pemerintah yang berlandaskan pada pembangunan perdesaan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu pembangunan desa yang melibatkan seluruh masyarakatnya untuk berperan aktif. Program yang dicanangkan meliputi pembangunan secara fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan nonfisik meliputi pembangunan kesehatan dan pendidikan. Selain itu untuk menanggulangi adanya pengangguran di desa, PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan program SPP dan peningkatan ketrampilan kelompok usaha ekonomi. Program SPP merupakan program simpan pinjam khusus kelompok perempuan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di perdesaan. Sedangkan peningkatan ketrampilan tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Setiyanto (2008) tentang evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Mayungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten 2005-2007. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui: (1) relevansi P2KP dengan kebutuhan masyarakat; (2) persiapan masyarakat dalam pelaksanaan P2KP; (3) sejauh mana pelaksanaan P2KP di Desa Mayungan; (4) dampak sosial ekonomi; (5) hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan P2KP di Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi program model CIPP yang dikembangkan oleh Stuffebeam.

Hasil dari penelitian tersebut adalah: (1) P2KP sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Mayungan karena merupakan kawasan perkotaan yang padat dengan penduduk miskin yang relatif besar; (2) persiapan masyarakat Desa Mayungan meliputi: rembug kesiapan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya; (3) pelaksanaan P2KP di Desa Mayungan secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan/teknis meskipun dalam pelaksanaan masih dijumpai kelemahan, diantaranya dalam pembentukan KSM, penyaluran dana, sosialisasi program, dan koordinasi antar bidang; (4) pelaksanaan P2KP menimbulkan dampak sosial ekonomi, meliputi timbulnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP, menambah keeratan hubungan antar warga kota yang bergabung dalam KSM, timbul kesadaran dari anggota KSM untuk mengangsur pinjaman secara teratur setiap bulan, transportasi semakin lancar, terbangunnya lembaga masyarakat,

berkembangnya usaha ekonomi berskala kecil di desa, dan ada peningkatan pendapatan kelompok sasaran; (5) hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan P2KP, yaitu dalam tahap persiapan, pengembangan intitusi lokal, pembinaan dan pengelolaan dana.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti akan meneliti tentang implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti program kegiatan masih dalam lingkup pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu, ada beberapa tujuan penelitian yang sama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program.

E. Kerangka Berfikir

Kemiskinan merupakan masalah kependudukan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Sehingga masalah ini perlu ada cara untuk menanggulanginya dengan meminimalisir jumlah penduduk miskin.

Pemerintah bersama masyarakat sudah berusaha keras untuk melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah terus menerus mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Salah satu program yang dilaksanakan saat ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini dilaksanakan dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan terciptanya kemandirian masyarakat dalam pemecahan masalah-

masalah yang ada di daerah mereka. Banyak jenis program yang dicanangkan dalam PNPM Mandiri ini, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini dikhususkan untuk desa-desa yang mempunyai jumlah penduduk miskin cukup banyak. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk implementasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Situwangi.

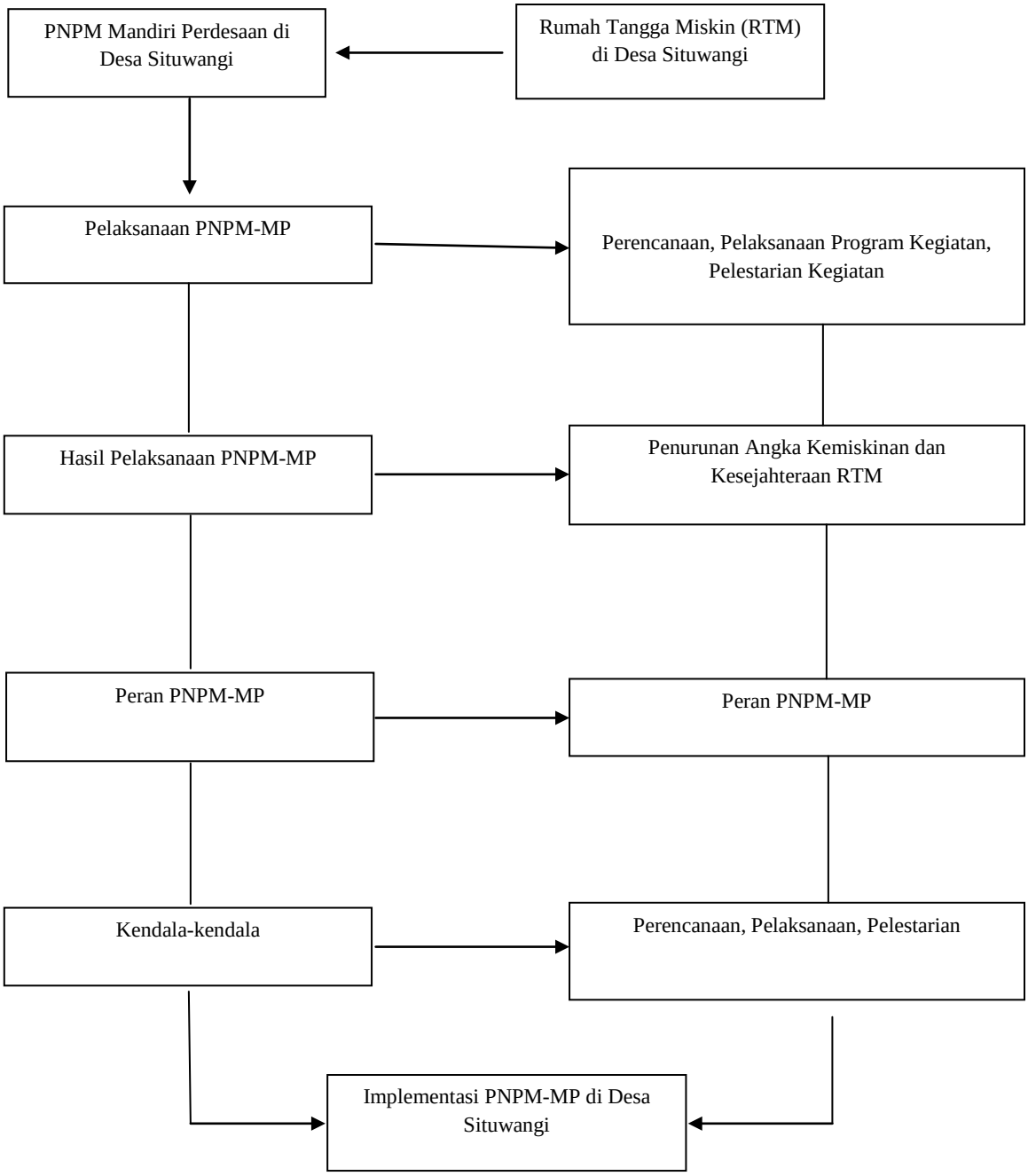

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Berfikir

F. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Situwangi, meliputi:
   a. Perencanaan
   b. Pelaksanaan program kegiatan
   c. Pelestarian
2. Bagaimana hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Situwangi, berupa:
   a. Penurunan angka kemiskinan
   b. Kesejahteraan RTM
3. Bagaimana peran PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Situwangi?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Situwangi, meliputi:
   a. Tahap perencanaan
   b. Tahap pelaksanaan
   c. Tahap pelestarian